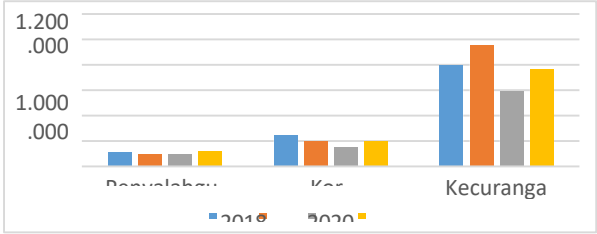


BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kecurangan menjadi salah satu ancaman terbesar dalam organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Dampak dari adanya tindakan kecurangan ini antara lain reputasi organisasi yang hancur, kerugian pada organisasi, kerugian pada keuangan pemerintah, hingga rusaknya moral karyawan (Andari & Ismatullah, 2019). Kecurangan yang menjadi masalah saat ini dapat terjadi di semua level dalam struktur organisasi perusahaan, level ini mencakup semua posisi atau jabatan, mulai dari level manajemen puncak hingga staf operasional. Hal ini menjadi perhatian karena banyak bisnis/usaha dari perusahaan tersebut sangat berpengaruh pada sebagian besar negara yang berkembang termasuk Indonesia (Nurani & Fuad, 2023).

Kecurangan laporan keuangan merupakan kategori kecurangan yang paling merugikan. Menurut *Report to the Nations* yang diterbitkan oleh *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE), kerugian rata-rata yang ditimbulkan akibat kecurangan pada laporan keuangan adalah tertinggi, secara lebih rinci ditunjukkan pada gambar 1.1 berikut ini:

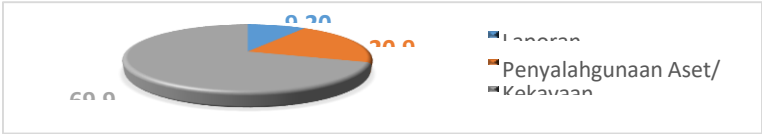


Sumber: ACFE Global (2018, 2020, 2022, 2024)

Gambar 1.1. Kerugian Rata-Rata Akibat Kecurangan

Gambar 1.1. mengindikasikan bahwa pada tahun 2018, 2020, 2022 dan 2024, kecurangan laporan keuangan secara berkesinambungan menyebabkan kerugian yang paling besar dibandingkan dengan kategori lainnya. Kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan laporan keuangan melampaui kerugian dari kategori penyalahgunaan aset dan korupsi. Kerugian yang ditimbulkan akibat kecurangan laporan keuangan tahun 2024 sebesar USD 766,000 per kasus dengan persentase 5%, sedangkan untuk kategori korupsi USD 200,000 per kasus (48%) dan penyalahgunaan aset dengan kerugian terkecil USD 120,000 per kasus, namun dengan persentase kejadian terbanyak 89%. Fakta ini menarik untuk ditelusuri. Determinan kecurangan laporan keuangan perlu diselidiki sehingga angka kerugian diharapkan dapat ditekan untuk tahun-tahun selanjutnya.

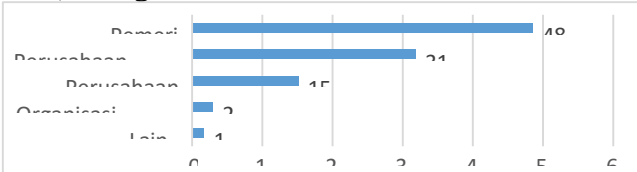
Di Indonesia, optimalisasi kebijakan strategis juga dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (2020). Kebijakan tersebut mencakup lima hal yaitu meningkatkan skala ekonomi, mempersempit kesenjangan regulasi dan pengawasan, mengakselerasi akses keuangan dan mendorong penguatan perlindungan konsumen, serta mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Berdasarkan survey fraud Indonesia yang dilaksanakan oleh ACFE Indonesia tahun 2019, bahwa kecurangan yang paling merugikan Indonesia adalah korupsi (69,90%) dapat dilihat pada gambar 1.2. berikut:



Sumber: ACFE Indonesia (2020)

Gambar 1.2. Kecurangan yang Paling Merugikan Indonesia

Sedangkan dilihat dari lembaga yang paling dirugikan karena kecurangan, Pemerintah dan BUMN menempati posisi tertinggi sesuai dengan data survei ACFE Indonesia (2019) sebagai berikut:



Sumber : ACFE Indonesia (2020)

Gambar 1.3. Lembaga Indonesia yang paling Dirugikan

Berdasarkan gambar 1.3., BUMN dirugikan oleh kecurangan sebanyak 31,8%. Data survei ACFE tahun 2019 menemukan total kerugian akibat kasus fraud di Indonesia mencapai Rp. 873,43 Miliar dimana jumlah rata-rata kerugian per kasus lebih dari Rp. 7 Milyar dan sebanyak 38,5% diantaranya adalah kasus kecurangan dengan jumlah kerugian lebih dari Rp. 1 Milyar. Kasus kecurangan laporan keuangan sendiri menempati posisi ketiga sebagai kasus fraud dengan kerugian terbesar yaitu mencapai Rp. 242,26 Milyar (Siswantoro, 2020).

Meskipun berbagai standar pelaporan keuangan telah diberlakukan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, kecurangan dalam pelaporan keuangan masih terjadi. Beberapa kasus kecurangan perusahaan BUMN terjadi di Indonesia yaitu pertama kasus korupsi yang dilakukan PT Garuda Indonesia (Persero Tbk) yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 8,8 Triliun, dimana kerugian tersebut diakibatkan dari pengadaan pesawat CRJ-1000 dan pengambilalihan pesawat ATR 72-100 yang tidak sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip pengadaan barang BUMN. Kedua kasus PT Kimia Farma (Persero) Tbk, kasusnya penggunaan ulang alat tes antigen bekas pakai pada tahun 2021 lalu. Mengutip dari laporan keuangan yang ada pada BEI, laba yang dihasilkan oleh PT Kimia Farma pada tahun berjalan adalah sebesar Rp 17,63 miliar, padahal pada tahun sebelumnya mengalami kerugian sebesar 12,72 miliar.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Keterampilan Akuntansi, Pengetahuan Akuntansi Forensik, dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pendeteksian dan Pencegahan Kecurangan dimoderasi oleh Dukungan Organisasi Di PT PLN (Persero)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi faktor kemungkinan keterampilan akuntansi, pengetahuan akuntansi forensik, dan sistem informasi akuntansi mempengaruhi pendeteksian dan pencegahan kecurangan di PT PLN (Persero).
2. Mengidentifikasi keterampilan akuntansi tidak berjalan searah dengan pendeteksian dan pencegahan kecurangan di PT PLN (Persero).
3. Mengidentifikasi pengetahuan akuntansi forensik tidak berjalan searah dengan pendeteksian dan pencegahan kecurangan di PT PLN (Persero).
4. Mengidentifikasi sistem informasi akuntansi tidak berjalan searah dengan pendeteksian dan pencegahan kecurangan di PT PLN (Persero).
5. Mengidentifikasi dukungan organisasi mampu memoderasi faktor keterampilan akuntansi, pengetahuan akuntansi forensik, dan sistem informasi akuntansi terhadap pendeteksian dan pencegahan kecurangan di PT PLN (Persero).

1.3. Pembatasan Masalah

Agar penelitian terfokus pada suatu permasalahan serta cakupan penelitian tidak terlalu luas, maka penulis menetapkan pembatasan masalah berikut:

1. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu keterampilan akuntansi, pengetahuan akuntansi forensik, dan sistem informasi akuntansi, variabel dependen yaitu pendeteksian dan pencegahan kecurangan, serta variabel moderating yaitu dukungan organisasi.
2. Penelitian ini dilakukan pada PT PLN (Persero) tahun 2025.
3. Pengambilan data menggunakan kuesioner dengan skala likert sebagai skala pengukuran. Kuesioner ini berisi item pernyataan dari indikator masing-masing variabel keterampilan akuntansi, pengetahuan akuntansi forensik, sistem informasi akuntansi, pendeteksian dan pencegahan kecurangan, serta dukungan organisasi.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang timbul dalam penelitian adalah :

1. Apakah keterampilan akuntansi berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan di PT PLN (Persero)?
2. Apakah pengetahuan akuntansi forensik berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan di PT PLN (Persero)?
3. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan di PT PLN (Persero)?
4. Apakah keterampilan akuntansi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan di PT PLN (Persero)?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh keterampilan akuntansi terhadap pendeteksian kecurangan di PT PLN (Persero).
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan akuntansi forensik terhadap pendeteksian kecurangan di PT PLN (Persero).
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap pendeteksian kecurangan di PT PLN (Persero).
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh keterampilan akuntansi terhadap pencegahan kecurangan di PT PLN (Persero).

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
Untuk menambah pengetahuan dalam pendeteksian dan pencegahan kecurangan, khususnya dipengaruhi oleh faktor keterampilan akuntansi, pengetahuan akuntansi forensik, dan sistem informasi akuntansi.
2. Bagi Perusahaan
Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pendeteksian dan pencegahan kecurangan di kantor PT PLN (Persero).
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Sebagai bahan referensi atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di masa yang akan datang, baik dengan menambah variabel atau mengubah variabel.
4. Bagi Universitas Prima Indonesia
Sebagai tambahan referensi penelitian bagi Program Studi Magister Akuntansi Universitas Prima Indonesia.

2.1. Kerangka Teoritis

2.1.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori agensi menerangkan perihal hubungan keagenan yang mengatur kontrak dari principal (pemegang saham) yang memberikan perintah kepada agent (manajemen) untuk menjalankan operasional perusahaan atas nama principal dan memberi kewenangan kepada manajemen untuk mengambil keputusan yang terbaik. Namun, konflik kepentingan bisa timbul dalam hubungan keagenan. Satu sisi, pemegang saham menginginkan pengembalian yang besar atas investasinya. Sementara, manajemen berkeinginan untuk mensejahterakan hidupnya dari insentif dan bonus yang didapatkan dari pemegang saham. Konflik kepentingan tersebut bisa memicu manajemen untuk bertindak curang demi mencapai tujuannya. Oleh karenanya, segala upaya akan dilakukan untuk memperoleh evaluasi yang bagus dari pemegang saham, termasuk dengan melakukan manipulasi pada laporan keuangan (Indriani & Rohman, 2022).

2.1.2. Kecurangan

2.1.2.1. Definisi Kecurangan

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), kecurangan merupakan tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain (Thaifur & Amiruddin, 2024). *Institute of Internal Auditor* mendefinisikan kecurangan sebagai perbuatan yang dicirikan dengan pengelabuan atau pelanggaran kepercayaan untuk mendapatkan asset, jasa atau mencegah pembayaran atau kerugian atau untuk menjamin keuntungan/manfaat pribadi dan bisnis (Priantara, 2013).

2.1.2.2. Bentuk Kecurangan

Association of Fraud Examiner (ACFE) mengklasifikasikan kecurangan menjadi tiga kategori yakni *asset misappropriation*, *financial statement fraud* dan *corruption*.

1. *Asset Misappropriation*
Asset Misappropriation adalah tindakan pencurian atau penyalahgunaan aset perusahaan atau pihak lain demi kepentingan pribadinya, dimana kecurangan jenis ini mudah untuk dideteksi karena sifatnya *tangible*, *countable* dan mudah ditelusuri keberadaannya pada objek yang disalahgunakan.
2. *Financial Statement Fraud*
Financial statement fraud adalah tindakan yang dilakukan oleh *top/executive management* di suatu perusahaan untuk menampilkan informasi keuangan yang

tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan cara merekayasa informasi tersebut (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangan. Rekayasa keuangan ini ditunjukkan supaya kinerja keuangan perusahaan mendapatkan kesan dan penilaian baik dihadapan para *stakeholder* yang biasa disebut *window dressing*.

3. *Corruption*

Corruption adalah tindakan kecurangan paling sulit dideteksi dimana seorang karyawan menyalahgunakan wewenang dan jabatan dalam perusahaan untuk bekerja sama dengan para oknum yang saling menutupi satu sama lain guna menikmati keuntungan bersama. Kecurangan jenis ini banyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya masih lemah dan faktor integritasnya yang kurang baik (ACFE, 2022).

2.1.2.3. Unsur-Unsur Kecurangan

Unsur-unsur pembentuk fraud sangat penting untuk kita ketahui, karena jika unsur-unsur tidak ada, maka kasus itu baru dalam tahap *error*, *negligence* atau kelalaian, pelanggaran etika atau pelanggaran komitmen pelayanan. Dengan kata lain seluruh unsur-unsur dari kecurangan harus ada, jika tidak ada maka dianggap kecurangan atau fraud tidak terjadi. Unsur tersebut adalah:

1. Terdapat pernyataan yang dibuat salah satu atau menyesatkan (*misrepresentation*) yang dapat berupa suatu laporan, data atau informasi, ataupun bukti transaksi.
2. Bukan hanya pembuatan pernyataan salah, tetapi *fraud* adalah perbuatan melanggar peraturan, standar, ketentuan dan dalam situasi tertentu melanggar hukum.
3. Terdapat penyalahgunaan atau pemanfaatan kedudukan, pekerjaan, dan jabatan untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya.
4. Meliputi masa lampau atau sekarang karena perhitungan kerugian yang diderita korban umumnya dihubungkan dengan perbuatan yang sudah dan sedang terjadi.

2.1.2.4. Faktor Penyebab Kecurangan

Cressey (1953) menyatakan jika kecurangan laporan keuangan disebabkan oleh tiga kondisi, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) yang sering disebut dengan *fraud triangle*.

1. Tekanan

Tekanan adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Pada umumnya yang mendorong terjadinya kecurangan adalah kebutuhan finansial tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan. Tekanan situasional berpotensi muncul karena adanya kewajiban keuangan yang melebihi batas kemampuan yang harus diselesaikan manajemen.

2. Kesempatan

Kesempatan adalah peluang yang memungkinkan kecurangan terjadi. Biasanya disebabkan karena pengendalian internal suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, atau penyalahgunaan wewenang.

2.1.3. Pendeteksian Kecurangan

2.1.3.1. Pengertian Pendeteksian Kecurangan

Menurut Tarjo et al. (2021:8) pendeteksian kecurangan adalah tindakan dan aktivitas untuk mengidentifikasi dan menemukan penipuan sebelum, selama dan setelah selesainya aktivitas penipuan (Tarjo et al., 2018). Menurut Haryono Umar et al. (2021) pendeteksian kecurangan adalah suatu tindakan untuk mengetahui apakah kecurangan terjadi, siapa pelakunya dan siapa korbannya (Umar et al., 2021).

2.1.4. Keterampilan Akuntansi

2.1.4.1. Pengertian Akuntansi

Menurut Hery (2011), akuntansi merupakan aktivitas pencatatan transaksi keuangan yang diolah menjadi data keuangan sehingga menghasilkan informasi dan dapat digunakan oleh pihak internal maupun eksternal dalam pembuatan keputusan (Hery, 2011). Menurut L.M. Samryn (2017), akuntansi adalah sebuah sistem informasi dengan proses mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan yang akhirnya akan menghasilkan sebuah laporan keuangan. Dalam membuat sebuah laporan keuangan diperlukan sebuah bukti transaksi yang tertulis (Samryn, 2017).

2.1.4.2. Pengertian Keterampilan Akuntansi

Keterampilan berasal dari istilah "terampil," yang menggambarkan kemampuan, kecekatan, dan kecakapan. Iverson berpendapat bahwa untuk mencapai keterampilan, seseorang memerlukan proses pelatihan. Kemampuan dasar ini membantu seseorang dalam menghasilkan sesuatu yang berharga dengan efisiensi. Keterampilan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan logika,

idealisme, dan kreativitas dalam menjalankan, mengubah, atau menciptakan sesuatu yang memiliki makna. Pandangan Gordon mengatakan bahwa keterampilan adalah kemampuan untuk menjalankan pekerjaan dengan lancar dan akurat. Sementara menurut Higgins, keterampilan adalah kemampuan untuk bertindak dan menyelesaikan tugas dengan baik (Rostiati et al., 2021).

2.1.4.3. Klasifikasi Keterampilan

Menurut Robbins, keterampilan terdiri dari 4 macam, yakni:

1. Basic literacy skill, keterampilan dasar ialah keterampilan yang wajib dipunyai oleh setiap orang, yakni mendengar, membaca, serta menulis;
2. Technical skill, keterampilan teknik adalah kemampuan mengembangkan teknik yang dipunyai, yakni mengoperasikan komputer, menghitung secara tepat;
3. Interpersonal skill, keterampilan interpersonal adalah keahlian efektif guna melakukan interaksi dengan rekan kerja lainnya, yakni mengutarakan pendapat dengan jelas, pendengar yang baik, serta bekerja secara tim;
4. Problem solving, penyelesaian masalah adalah tahapan aktivitas guna mengasah logika, melakukan argumentasi serta menyelesaikan masalah, keahlian dalam mengetahui penyebab, mengembangkan menganalisa alternatif dan menentukan penyelesaian yang terbaik (Robbins et al., 2008).

2.1.4.4. Standar Akuntansi

Standar akuntansi digunakan dalam mencatat dan melaporkan data keuangan, hal ini menjadi tuntutan bagi pihak manajemen untuk bisa melihat laporan keuangan antar perusahaan yang memiliki perbedaan atau kesamaan, kemudian tugas manajemen adalah membandingkan data laporan keuangan tersebut. DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) merupakan badan otorisasi yang mempunyai sebuah tanggung jawab untuk melakukan perkembangan pada standar akuntansi di Indonesia. DSAK telah mengeluarkan 2 hal yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).

2.1.4.5. Pengertian Akuntansi Forensik

Menurut Tuanakotta (2010), Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, di sektor publik maupun privat (Tuanakotta, 2010).

2.1.4.6. Pengertian Pengetahuan Akuntansi Forensik

Menurut Mubarak et al. (2007), pengetahuan merupakan ingatan yang dihasilkan mengenai suatu hal, termasuk ingatan mengenai kejadian-kejadian yang pernah terjadi baik secara sengaja maupun tidak serta hal ini terjadi setelah berhubungan atau mengamati suatu objek tertentu (Mahardhika, 2020). Menurut Paulus Wahana (2016) menjelaskan bahwa: Kata pengetahuan sendiri termasuk kata benda yang tersusun dari kata dasar “tahu” dan memperoleh imbuhan “pe –an”, yang secara singkat memiliki arti segala hal yang berkenaan dengan kegiatan tahu atau mengetahui. Pengertian pengetahuan mencakup segala kegiatan dengan cara dan sarana yang digunakan maupun segala hasil yang diperolehnya (Akhmad, 2023).

2.1.5. Sistem Informasi Akuntansi

2.1.5.1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Steven A. Moscov dalam (Setiadi, 2020), Sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan pihak luar (seperti kantor pajak, kreditur, pemerintah) dan pihak dalam (manajer dan karyawan). Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan suatu sistem terintegrasi yang terdiri dari komponen-komponen fisik dan non-fisik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan kepada pengguna, baik internal (manajemen) maupun eksternal (investor, kreditur, pemerintah).